



Catatan Serial Diskusi Globalisasi Koalisi MKE #2:

Menyoal Strategi Diplomasi Indonesia di Tengah Kontestasi Tata Kelola Global

Disusun oleh:

Arieska Kurniawaty

(Puanifesto)

Lutfiyah Hanim

(Indonesia for Global Justice)

Salsabila Putri Noor Aziziah

(Puanifesto)

Olisias Gultom

(Hints)

Pengantar

Sejak rezim Joko Widodo (Jokowi) dimulai, rakyat Indonesia dihadapkan dengan masifnya pembangunan infrastruktur yang diklaim sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi. Di tengah krisis multidimensi yang terjadi di dunia, proyek justru berdampak buruk karena dieksekusi tanpa persetujuan rakyat. Namun penolakan tersebut direspon dengan represi. Kemunduran demokrasi¹ diperparah lagi pada proses Pemilu 2024 yang penuh dengan penyalahgunaan kewenangan berbagai pejabat publik termasuk Presiden yang secara terang-terangan menggiring opini masyarakat untuk memilih calon tertentu. Terpilihnya Prabowo sebagai presiden selanjutnya juga menjadi kelanjutan berbagai proyek pembangunan dan investasi warisan Jokowi. Salah satu agenda yang dilanjutkan adalah ambisi Indonesia Emas 2045 yang menjadi pathways untuk Indonesia dikategorikan sebagai 'negara maju'.

1) <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c9901z9lp0go>

Langkah-langkah tersebut terus Pemerintah tempuh salah satunya dengan upaya menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Perlu diingat bahwa Indonesia juga merupakan anggota di berbagai organisasi atau forum antarpemerintah di luar PBB, seperti G20. Selain itu terdapat organisasi lain seperti BRICS yang terdiri dari negara-negara kekuatan baru seperti Brazil, Russia, India, Cina, Afrika Selatan, dan lainnya. Organisasi-organisasi mencerminkan kontestasi politik global di mana kelompok G7 dan NATO yang merupakan bagian besar dari OECD dan G20 terus berusaha untuk membendung pengaruh dari Rusia dan Cina. Meskipun demikian, negara-negara selatan terus berusaha untuk lepas dari dominasi hegemoni Amerika Serikat salah satu contohnya dengan wacana dedollarization² atau mengakhiri ketergantungan dengan dolar AS untuk transaksi internasional.

Keputusan Indonesia untuk memproses keanggotaannya dalam OECD juga secara tidak langsung dapat dilihat sebagai posisi Indonesia di tengah kontestasi politik global. Namun dibalik keputusan tersebut terdapat serangkaian persyaratan yang akan mempersempit ruang gerak penyusunan kebijakan di Indonesia. Maka penting untuk memahami perkembangan situasi global hari ini dan arah posisi diplomasi internasional Indonesia, serta kemungkinan membangun gerakan alternatif global sebagai rekomendasi atas respon situasi yang ada.

Tatanan Politik Internasional Hari Ini

Tatanan dunia akan terus bergerak, politik internasional saat ini merupakan hasil dari perubahan dan dinamika sejarah di mana kekuasaan dan dominasi terus bergeser. Struktur yang ada hari ini pun akan terus bergerak dan membentuk tatanan baru secara konstan. Pasca Perang Dunia II, muncul negara-negara yang baru merdeka dan terbentuk sistem internasional berupa General Tariffs and Trade (GATT). Di saat

yang bersamaan muncul 2 blok kekuatan yaitu blok barat dan blok timur yang mempengaruhi relasi global. Namun dengan runtuhnya Uni Soviet pada 1988, dunia bergeser menjadi tatanan unipolar dengan Amerika Serikat sebagai kekuatan tunggal dan menjadi momentum dimulainya globalisasi dan neoliberalisme di mana AS menjadi rule-maker dan negara berkembang tidak dapat keluar dari ketergantungan tersebut. Pada dasarnya neoliberalisme secara harfiah berarti “neo” atau baru dan “liberal” atau bebas, menunjukkan bahwa paradigma tersebut diklaim sebagai “kebaruan” dari liberalisme Abad ke-19. Namun sesungguhnya tidak ada kebaruan maupun pembebasan di dalamnya, kebebasan sesungguhnya berada di tangan korporasi untuk mengekstraksi, menghasilkan polusi, dan menimbun kekayaan. Kebebasan yang diberikan pada korporasi kemudian mengorbankan kebebasan fundamental 99% populasi di dunia. Trickle down economy yang dijanjikan para penganut ekonomi liberal tidak terealisasi dan yang terjadi adalah trickle up economy di mana 1% dari populasi terus menerus mendapatkan potongan besar dari ekonomi dunia.³

Baik di tingkat individu maupun negara, diskusi tentang “kebebasan” menjadi relevan. Kebebasan dalam hal ini adalah bagaimana seseorang atau suatu entitas memiliki pilihan dan mengeksekusi pilihannya namun tentunya berpengaruh pada entitas lain. Contohnya dalam sistem perdagangan global di mana semua perjanjian terdiri dari ketentuan-ketentuan atau “cara main”. Walaupun terdapat beberapa persamaan antara kebebasan individu dan negara, tidak ada yang dapat menjamin suatu negara—khususnya Negara Maju—terus tunduk pada ketentuan yang telah disepakati. Seperti dalam kasus pengesahan **CHIPS and Science Act**⁴ oleh Pemerintah AS yang bertolak belakang dengan ketentuan pelarangan subsidi WTO.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa meskipun AS merupakan salah satu negara yang mendorong rules-based system, termasuk **WTO Appellate Body**⁵

2) <https://blogs.lse.ac.uk/internationaldevelopment/2024/02/29/long-read-the-beginning-of-the-end-for-the-us-dollars-global-dominance/>

3) Joseph E. Stiglitz, “Where Global Governance Went Wrong—and How to Fix It,” *Foreign Policy*. April 28, 2024. Diakses pada 20 Mei 2024. <https://foreignpolicy.com/2024/04/28/global-governance-wto-how-to-fix-it/>

4) <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/08/09/fact-sheet-chips-and-science-act-will-lower-costs-create-jobs-strengthen-supply-chains-and-counter-china/>

5) https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/appellate_body_e.htm

,tetapi saat peraturan tidak menguntungkan— mereka akan acuh terhadap ketentuan tersebut. Contoh lain dari tidak adanya sistem check-and-balances dalam tata kelola global adalah saat sistem banding WTO digunakan untuk menyerang negara berkembang yang tengah mengembangkan industri domestiknya seperti Indonesia⁶ dan Brazil.⁷ **Unilateralisme** AS juga ditunjukkan saat Presiden Trump menghalangi proses pembentukan Badan Banding (appellate body) dalam WTO dan menimbulkan ketidakpastian.⁸

Disrupsi terhadap sistem multilateralisme mendorong berbagai negara **middle power**⁹ berusaha untuk keluar dari hegemoni Negara Utara. Serangkaian dinamika yang terjadi dalam WTO juga menyebabkan Negara Selatan berusaha melawan dikte ‘perdagangan bebas’ yang selama ini menjadi alat Negara Utara¹⁰ untuk mencengkram mereka. Ini diikuti seiring dengan munculnya Cina sebagai kekuatan baru yang berusaha memperluas pengaruhnya baik di Asia hingga Afrika khususnya melalui investasi pembangunan.

Sebelum munculnya agenda pembangunan jalur sutra (**Belt Road Initiative/BRI**) dan **Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)** yang diluncurkan dalam kurun waktu berdekatan, dana investasi Cina sudah menyebar di negara-negara yang terdampak embargo/sanksi ekonomi seperti Venezuela, Rusia, dan Iran melalui China Bank Development (CBD) dan Export-Import Bank of China. Kedua institusi tersebut mengalirkan dana utang sebesar AS\$450 miliar pada tahun 2008-2019, hampir sama dengan jumlah dana utang dari Bank Dunia.¹¹

Secara umum BRI diluncurkan oleh Cina untuk menjamin pasokan bahan mentah seperti pangan, bahan bakar, dan mineral dan komoditas impor lainnya yang dibutuhkan Cina. Selain itu, terdapat beberapa tujuan implementasi BRI termasuk (1) membuka kesempatan untuk ekspansi korporasi Cina; (2) ketergantungan terhadap pasar Barat berkurang seiring dengan meningkatnya kapabilitas ekonomi mitra dagang Cina di Kawasan Eurasia dan memperkuat sentralitas ekonomi Cina; (3) membuka pasar baru untuk industri Cina memasarkan surplus produksinya; (4) membangun standarisasi ala Cina seperti dalam sektor komunikasi dan teknologi; dan (5) ekspansi ekonomi juga dapat menjadi katalis internasionalisasi mata uang Yuan.¹²

‘Kemenangan’ Cina saat perundingan Regional Economic Comprehensive Partnership (RCEP) diselesaikan. RCEP merupakan salah satu perjanjian perdagangan paling besar yang melibatkan 10 Negara Anggota ASEAN, Cina, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Peran Cina semakin menguat dalam kontestasi regional saat Trump keluar dari Trans Pacific Partnership (TPP) dan India menarik diri sebelum ratifikasi RCEP. Dengan ini Cina menunjukkan dirinya sebagai mitra negara ASEAN sehingga secara perlahan menggerus pengaruh AS di Kawasan Asia Pasifik.¹³ Meskipun demikian, negara-negara middle power anggota RCEP bukan berarti akan berhenti bekerja sama dengan AS dan serta merta beralih pada Cina sepenuhnya.

Situasi tersebut ditambah lagi dengan konteks krisis ekonomi akibat pandemi dan perang Rusia-Ukraina yang mendorong negara-negara untuk

6) <https://www.reuters.com/markets/commodities/indonesia-plans-appeal-after-losing-wto-nickel-dispute-with-eu-2022-11-30/>

7) <https://www.cbc.ca/news/business/wto-rules-against-brazilian-jet-subsidies-1.225411>

8) <https://www.iisd.org/articles/policy-analysis/wto-dispute-settlement-without-appellate-body>

9) Negara middle power ditentukan baik dari aspek fisik seperti populasi dan kapabilitas ekonomi atau militer maupun melalui status dan peran yang mereka mainkan dalam tatanan internasional. Moch Faisal Karim, “Middle power, status-seeking and role conceptions: the cases of Indonesia and South Korea,” *Australian Journal of International Affairs*, 2018. <https://doi.org/10.1080/10357718.2018.1443428>

10) <https://www.thejakartapost.com/opinion/2023/07/25/wto-we-need-you-back.html>

11) Stewart Paterson, “The AIIB: Still a geo-economic tool for China?” *The Hinrich Foundation* (Agustus 2021), hlm. 9-10.

12) *Ibid*, hlm. 12.

13) Rumana Islam, “The Geopolitical Impact of RCEP-Another Feather to the Chinese Crown?” <https://www.afronomicslaw.org/category/analysis/geopolitical-impact-rcep-another-feather-chinese-crown>

melakukan *friendshoring* di mana suatu negara akan memilih negara dengan “risiko rendah” sebagai mitra dagangnya untuk menghindari disrupsi rantai pasok.¹⁴ Menteri Keuangan AS, Janet Yellen, menyatakan bahwa kerja sama internasional perlu dilakukan dengan negara sahabat.

Baginya hal ini perlu ditempuh untuk memperluas akses pasar dan menurunkan risiko ekonomi.

¹⁵ Hal ini dapat dilihat dari korporasi AS seperti Apple yang berusaha memindahkan produksinya dari Cina ke India yang dianggap lebih ‘stabil’.¹⁶ Selain *friendshoring*, upaya lainnya dilakukan AS untuk membendung pengaruh Cina yaitu melalui Indo-Pacific Economic Partnership (US IPEF) yang melibatkan sebagian negara ASEAN (Brunei, Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam), Australia, Fiji, India, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. Meskipun tidak ada akses market yang ditawarkan, berbagai pihak melihat IPEF sebagai alat politik AS di Kawasan Asia Pasifik. Selain untuk menjamin rantai pasok, IPEF juga digunakan untuk mengatur standar atau norma baru khususnya untuk sektor digital.¹⁷

Premis bahwa tatanan dunia ini akan terus berubah tercermin dari bagaimana setidaknya tiga kekuatan dunia yaitu AS bersama sekutunya, Rusia, dan Cina berdinamika. Dalam diskusi, Olisias Gultom dari Sahita Institute menjelaskan bahwa globalisasi yang mengalami kegagalan mulai ditantang oleh kekuatan baru yang muncul seperti Cina dan India sehingga regionalisme pun menguat menuju dunia yang multi polar. Saat ini, ia lanjut, perkawanan menjadi penting untuk menavigasi geopolitik. Lalu di tengah kontestasi kekuatan global, Indonesia menjadi berusaha mengukuhkan statusnya dalam dunia internasional. Hal ini dilakukan melalui beberapa upaya *status-seeking*.

Indonesia di tengah Pusaran Kontestasi Tata Kelola Global

Status middle power dapat dilihat sebagai status yang didapat dari keterlibatan aktif suatu negara dalam tatanan internasional. Sebagai aktor sosial, negara juga mencari status untuk mencapai superioritas yang lebih tinggi dalam struktur hirarki sistem internasional. Selain itu status *middle power* juga dibentuk dari persepsi aktor di suatu negara atau *self-identification*.¹⁸ Secara ukuran maupun kapabilitas ekonomi, Indonesia memang secara kasat mata dapat dikategorikan sebagai middle power. Populasi Indonesia merupakan yang keempat terbesar di dunia, dengan populasi muslim terbesar. Selain itu Indonesia telah sukses melakukan proses demokrasi elektoralnya sejak tahun 2004 dibawah kepemimpinan SBY. Pada saat itu belum ada aktor dalam negeri yang menyebut secara eksplisit bahwa Indonesia adalah middle power. Namun Indonesia mulai mengambil peran di tingkat internasional seperti menjadi tuan rumah Conference of Parties (COP) 13 UNFCCC dan KTM WTO ke-9 di 2013.

Berbeda dengan middle power Negara Utara seperti negara-negara Skandinavia, Indonesia setidaknya memiliki empat peran middle power termasuk sebagai (1) pemimpin di tingkat kawasan Asia Tenggara; (2) representasi Negara Berkembang, (3) pendorong demokrasi, dan (4) *bridge-builder*.¹⁹ Keempat peran ini dilakukan Indonesia sepanjang sejarahnya terlibat dalam kancah politik internasional.

Dimulai dari bagaimana Indonesia mendorong semangat anti-kolonialisme Barat sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dan menjadi salah satu pencetus gerakan Konferensi Asia-Afrika. Saat itu juga Indonesia menjadi salah satu yang mengkritik keras tatanan dunia

14) <https://www.weforum.org/agenda/2023/02/friendshoring-global-trade-buzzwords/#:~:text=Essentially%20friendshoring%20refers%20to%20the,to%20the%20flow%20of%20business.>

15) <https://www.atlanticcouncil.org/news/transcripts/transcript-us-treasury-secretary-janet-yellen-on-the-next-steps-for-russia-sanctions-and-friend-shoring-supply-chains/>

16) <https://www.reuters.com/technology/apple-may-move-quarter-iphone-production-india-by-2025-jpm-2022-09-21/>

17) <https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Biden-s-Asia-policy/Indo-Pacific-Economic-Framework-is-not-an-FTA-5-things-to-know>

18) Moch Faisal Karim, “Middle power, status-seeking and role conceptions: the cases of Indonesia and South Korea,” *Australian Journal of International Affairs*, 2018: hlm. 7-8. <https://doi.org/10.1080/10357718.2018.1443428>

19) *Ibid*, hlm. 11.

liberal ala Amerika Serikat. Sayangnya, seiring berjalannya waktu Indonesia juga menggunakan berbagai norma liberal Barat seperti demokrasi yang membuat Indonesia dapat dikatakan sebagai negara **revisionis**.⁽²⁰⁾ Peran Indonesia dalam mempromosikan demokrasi pun menurun sejak terpilihnya Joko Widodo. Meskipun Indonesia berambisi untuk mendapat rekognisi internasional dengan menyelenggarakan berbagai forum internasional, hal ini justru terus menjadi salah satu bukti tergerusnya demokrasi di Indonesia. Seperti penyelenggaraan KTT G20 pada tahun 2022 yang diwarnai dengan pembatasan mobilisasi⁽²¹⁾ dan represi terhadap masyarakat sipil.⁽²²⁾ Skenario yang sama dilakukan oleh Pemerintah dalam KTT ASEAN 2023⁽²³⁾ dan pembubaran People's Water Forum yang merupakan forum alternatif World Water Forum.⁽²⁴⁾

Di tengah regresi demokrasi yang semakin parah, ambisi Indonesia tidak berhenti sampai pada status middle power atau pemimpin de facto ASEAN. Sebagai strategi menuju agenda Indonesia Emas 2045, Indonesia berencana untuk bergabung dalam **Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)**.⁽²⁵⁾ Pada tahun 2023, Menko Perekonomian Airlangga Hartanto menyebutkan bahwa Indonesia telah siap menjadi bakal calon anggota OECD.⁽²⁶⁾ Di awal 2024, Dewan OECD kemudian menanggapi dengan diterimanya Indonesia sebagai bakal calon anggota OECD.⁽²⁷⁾

OECD terbentuk pasca Perang Dunia II untuk merekonstruksi infrastruktur dan ekonomi negara Barat tidak melibatkan negara berkembang sebagai anggotanya di 50 tahun pertama. OECD yang mengidentifikasi dirinya sebagai 'rule

maker' dan pembuat 'standar internasional'. Keinginan Pemerintah menjadi anggota OECD hanya beralasan praktikal karena OECD dianggap memiliki "resep" untuk membawa Indonesia menjadi negara maju.

Secara global pun OECD telah mendikte berbagai kebijakan yang diklaim sebagai "standar internasional" yang adalah standar yang dibuat OECD sendiri. Standar yang sesungguhnya mendorong liberalisasi pasar, menurunkan pajak korporasi multinasional dan lain sebagainya. OECD juga terbukti berupaya melakukan lobi di balik layar penyusunan kebijakan di negara anggotanya.⁽²⁸⁾ Seperti yang terjadi ketika lembaga tersebut melobi pemerintah Australia menunda pemberlakuan undang-undang yang akan mewajibkan transparansi pembayaran pajak perusahaan multinasional. Dalam rilis Tax Justice Network (Jaringan Pajak Berkeadilan) pertengahan 2023,⁽²⁹⁾ disebutkan Undang-undang yang diusulkan Australia, akan mengharuskan perusahaan multinasional besar yang beroperasi di Australia untuk mempublikasikan laporan negara per negara. Laporan tersebut dirancang untuk mengungkap pengalihan keuntungan (**profit shifting**) yang mungkin dilakukan perusahaan multinasional ke negara bebas pajak.

Jika OECD telah melakukan upaya intervensi kepada negara besar seperti Australia dalam penyusunan kebijakan, bagaimana kedaulatan negara lain, seperti Indonesia jika dalam proses atau menjadi anggotanya? Tanpa menjadi anggota pun Indonesia telah sukarela diatur oleh berbagai standar yang dimiliki OECD misalnya dalam membangun

20) Awidya Santikajaya, "Walking the Middle Path: The Characteristics of Indonesia's Rise," *International Journal*, Vol. 71, No. 4 (2016): 563-586.

21) <https://www.tempo.co/abc/8044/ktt-g20-di-tengah-restriksi-dan-represi-yang-harus-dihadapi-warga-bali>

22) <https://www.solidaritasperempuan.org/gegap-gempita-g20-pembungkaman-ruang-demokrasi-solusi-pal-su-dan-pengkhianatan-konstitusi/>

23) <https://koran.tempo.co/read/berita-utama/481938/pembungkaman-di-tengah-ktt-asean-2023>

24) <https://ylbhi.or.id/informasi/pembubaran-pwf-2024-bukti-nyata-menyempitnya-ruang-kebebasan-sipil/>

25) <https://www.bappenas.go.id/id/berita/segera-bergabung-dengan-oecd-strategi-mewujudkan-indonesia-emas-2045-9yHr9>

26) <https://en.antaranews.com/news/288963/indonesia-ready-to-become-oecd-member-minister-hartanto>

27) <https://jakartaglobe.id/news/indonesia-officially-a-candidate-member-to-oecd>

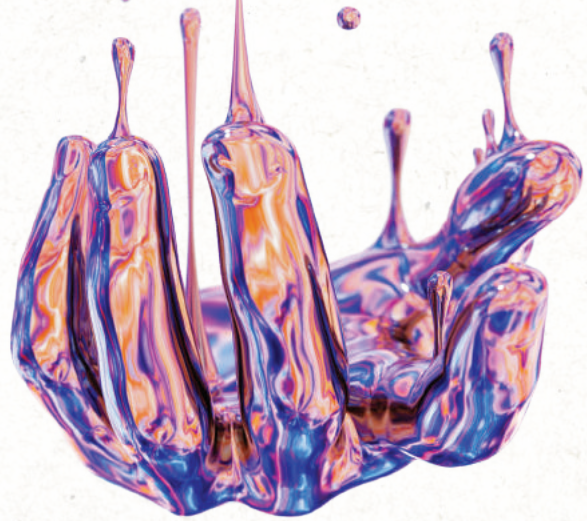
28) <https://taxjustice.net/press/ft-confirms-oecd-lobbied-against-australian-tax-transparency/> Juli 2023

29) <https://taxjustice.net/press/global-tax-rulemaker-under-fire-after-australia-pressured-to-delay-global-tax-transparency-breakthrough/>

agenda ekonomi biru³⁰ yang berbahaya bagi nelayan, masyarakat pesisir laut dan pulau kecil, investasi, pengaturan perbankan, asuransi hingga pengawasan sektor publik dalam kaitannya dengan korupsi.³¹ Untuk menjadi anggota OECD, Indonesia akan mengubah berbagai kebijakan nasionalnya untuk disesuaikan dengan OECD. Pada Maret 2024 lalu, sekretariat OECD telah menyampaikan peta jalan proses akses Indonesia menjadi anggota OECD.³² Peta jalan artinya adalah penyusunan berbagai kebijakan di Indonesia harus mengikuti peta jalan tersebut.

Jika dalam perundingan perjanjian perdagangan bebas, kedua belah pihak saling menawarkan, menyanggah dan mengusulkan draft kesepakatan. Maka dalam peta jalan menjadi anggota OECD tentu minim perundingan. Setidaknya ada 270 standar yang diklaim ‘internasional’ yang harus diikuti oleh negara yang akan menjadi anggota.³³ Tentu akan terjadi berbagai ketidaksesuaian, jika itu terjadi kepada siapa pemerintah akan berpihak? Pemerintah mengklaim bahwa banyak standar telah diikuti, melalui UU Cipta Kerja. Istilah ‘koherensi kebijakan’ yang sesungguhnya memotong ruang kebijakan negara dan menyerahkannya pada organisasi internasional yang terbukti bias kepentingan modal, negara maju dan perusahaan transnasional. Jika dalam negara yang demokratis, pembuatan kebijakan mengikutkan partisipasi masyarakat. Maka dengan mengikuti ‘koherensi kebijakan’ pembuatan aturan akan mengikuti OECD daripada melibatkan kepentingan masyarakat luas.

Sebelum mencapai tujuan menjadi negara anggota OECD, Indonesia akan terlebih dahulu dirampas ruang kewenangan dalam menyusun kebijakan. Alasan tersebut membuat negara ASEAN lainnya



enggan untuk menjadi anggota OECD. Rakyat telah dirugikan dari berbagai regulasi yang mempermudah perampasan lahan untuk investasi seperti UU Cipta Kerja, UU Minerba, dan UU Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Alih-alih berambisi untuk memperkaya ekonominya berdasarkan kedaulatan rakyat, Pemerintah Indonesia justru berusaha menjadi bagian dari klub “negara kaya” untuk menutupi ketimpangan, penindasan, dan pelanggaran hak yang terjadi di dalam negeri. Sayangnya harapan kosong yang Pemerintah terapkan pada perjanjian perdagangan bebas juga diterapkan pada harapan Indonesia menjadi anggota OECD.

Keputusan untuk memilih keanggotaan OECD dapat dilihat sebagai posisi dan langkah pragmatis diplomasi ekonomi Indonesia. Pragmatisme ini terus dilanjutkan demi melancarkan arus investasi asing ke Indonesia.³⁴ Meskipun sebelumnya berhembus wacana bahwa Indonesia akan bergabung BRICS, Presiden Jokowi menyanggah hal tersebut. Indonesia mengambil sikap pragmatis untuk mencegah terpengaruhnya relasi dengan AS apabila memilih bergabung dengan BRICS. Posisi ini menunjukkan bahwa Indonesia menghindari kesan ‘anti-Barat’ yang dilekatkan pada BRICS.³⁵ Selain itu, Indonesia justru kembali merapatkan relasinya

30) <https://www.antaraneews.com/berita/3762240/bappenas-oecd-jadi-panduan-realisasi-ekonomi-biru-di-indonesia>

31) <https://www.bappenas.go.id/index.php/id/berita/kerjasama-bappenas-oecd-untuk-review-integritas-sektor-publik>

30) <https://www.oecd.org/indonesia/ministers-welcome-roadmap-for-accession-discussions-with-indonesia.htm>

31) https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/02/29/antre-masuk-klub-negara-maju-regulasi-ri-akan-dikuti?open_from=Search_Result_Page

32) <https://www.thejakartapost.com/id/opinion/2023/06/12/pragmatic-diplomacy.html>

33) <https://theconversation.com/indonesia-tunda-gabung-brics-keputusan-tepat-tapi-aliansi-ini-tetap-penting-bagi-asean-212257>

34) <https://id.usembassy.gov/fact-sheet-president-joseph-r-biden-and-president-joko-widodo-announce-the-u-s-indonesia-comprehensive-strategic-partnership/>

35) <https://www.antaraneews.com/berita/4084050/dapat-dukungan-inggris-ri-sampaikan-minat-gabung-cptpp>

dengan AS melalui berbagai kesepakatan kerja sama seperti US IPEF, US-Indonesia Comprehensive Strategic Partnership,³⁶ dan ketertarikan Indonesia untuk bergabung *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP)*.³⁷

Posisi Negara Selatan dan Peluang Kerja Sama Selatan-Selatan

Di tengah dinamika tatanan politik internasional dan upaya Indonesia untuk mendapat status dan rekognisi, gerakan Negara-negara Selatan menjadi hal yang penting untuk didiskusikan. Gerakan non-blok (Non-Aligned Movement/GNB) secara historis menjadi pencetus dalam membentuk posisi politik netral Negara Selatan di tengah Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Indonesia menjadi salah satu pencetus GNB bersama India, Ghana, Mesir, dan Yugoslavia yang merumuskan Deklarasi Bandung pada 1955.

Poin-poin dalam Deklarasi Bandung kemudian dipertajam dengan Deklarasi Havana tahun 1979³⁸ di mana tertuang bahwa tujuan GNB adalah untuk memastikan kemerdekaan, kedaulatan, integritas dan keamanan teritorial negara anggota dalam gerakannya melawan imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, rasisme dan berbagai bentuk penundukan asing. Hingga tahun 2018, GNB beranggotakan 120 negara. Beberapa Negara Selatan yang juga anggota KAA yaitu Grup Afrika, India, dan Kuba mulai mendorong reformasi sistem perdagangan multilateral yang berpihak pada negara berkembang.³⁹ Mereka mendesak WTO untuk memperkuat kembali ketentuan special and differential treatment (perlakuan khusus dan berbeda/S&DT) bagi negara miskin dan berkembang yang berusaha membangun ekonomi negaranya. Dalam desakan tersebut negara berkembang melihat bahwa banyak dari ketentuan di WTO membatasi upaya negara berkembang untuk mencapai tujuan pembangunan dan industrialisasi contohnya seperti TRIPS yang

memonopoli pengetahuan dan menghambat transfer teknologi, subsidi yang dihambat untuk mendukung industri dalam negeri, dan ketentuan lainnya.

Dari gerakan anti-kolonialisme dan imperialisme hingga perdebatan tentang pembangunan di WTO, secara historis negara-negara Selatan terus mencari bentuk tatanan politik internasional alternatif. Salah satu potensi untuk membangun posisi tawar Negara Selatan adalah melalui South-South Cooperation (Kerja Sama Selatan-Selatan/SSC). Berdasarkan definisi resmi UN Office for South-South Cooperation (Kantor PBB untuk Kerja Sama Selatan-Selatan), SSC adalah upaya bersama masyarakat dan negara-negara Selatan yang lahir dari pengalaman dan simpati bersama, berdasarkan tujuan dan solidaritas bersama, dan dipandu oleh, antara lain, prinsip-prinsip penghormatan terhadap kedaulatan dan kepemilikan nasional, bebas dari persyaratan apa pun.⁴⁰ SSC tidak menggantikan bentuk tradisional Kerja Sama Selatan-Utara tetapi sifatnya melengkapi.

SSC sebagai antitesis dan alat dekolonisasi dari hegemoni Negara Utara tidak berusaha menghilangkan kewajiban historis Negara Utara atas dampak kolonialisme yang mereka lakukan pada Negara Selatan. SSC mengidentifikasi dirinya sebagai modalitas untuk menggeser praktek kerjasama internasional yang menimbulkan ketergantungan terhadap Negara Utara. Namun SSC juga menuai kritik dalam beberapa aspek. Pengaruh hegemoni baru seperti BRICS yang dapat menggeser tujuan utama dari SSC dan membawa pada bentuk kerja sama tradisional di tengah dinamika kontestasi dengan kekuatan politik Barat.⁴¹ Kekhawatiran selanjutnya berkaitan dengan bagaimana kepentingan elit tiap Negara Selatan mendominasi SSC di atas kepentingan mayoritas

36) <https://id.usembassy.gov/fact-sheet-president-joseph-r-biden-and-president-joko-widodo-announce-the-u-s-indonesia-comprehensive-strategic-partnership/>

37) <https://www.antaranews.com/berita/4084050/dapat-dukungan-inggris-ri-sampaikan-minqt-gabung-cptpp>

38) <https://policycommons.net/orgs/non-aligned-movement/>

39) WT/GC/W/778/Rev.3 <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/GC/W778R3.pdf&Open=True>

40) <https://unsouthsouth.org/about/about-sstc/>

41) <https://realityofaid.org/reality-check-ssc/>

rakyat di Negara Selatan. Selain itu minimnya keterlibatan masyarakat sipil dalam SSC juga menjadi tantangan transparansi dan akuntabilitas secara institusional.

Tujuan utama untuk dekolonisasi tatanan internasional harus kembali didudukkan dalam SSC. Tidak hanya sekadar mengganti hegemoni satu dengan yang lainnya tetapi membangun tatanan internasional yang setara dan adil tanpa adanya dominasi kuasa antar negara. Hal utama yang perlu didekonstruksi juga adalah bagaimana mengganti model pembangunan kapitalis yang ada saat ini. SSC juga perlu berjalan menjauhi kecenderungan neokolonialisme dan neoliberalisme dengan meretas cengkeraman korporasi dan menyusun serta mengimplementasi kebijakan melalui pendekatan bottom-up. Secara teoretis maupun praktek penting bagi SSC untuk mengadopsi pemikiran dan praktek kehidupan di berbagai wilayah termasuk Amerika Latin, Afrika, dan Asia.

Kesimpulan

Tatanan dunia terus berubah dengan pergeseran hegemoni dan kontestasi kekuatan ekonomi politik. Janji globalisasi yang gagal terpenuhi dan justru terjadi trickle up economy membawa AS sebagai hegemon ditantang oleh berbagai kekuatan ekonomi baru seperti BRICS. Aturan main yang diimplementasikan secara semena-mena oleh AS dan Negara Barat menyebabkan terjadinya krisis multilateralisme contohnya dalam WTO. Momentum ini digunakan oleh Cina untuk memperkuat pengaruh ekonomi maupun geopolitik melalui RCEP, Belt Road Initiative, maupun AIIB. Di tengah kontestasi tersebut Indonesia sebagai middle power secara pragmatis memilih berbagai bentuk kerja sama yang 'menguntungkan' demi melancarkan agenda investasi dan pembangunan yang kapitalistik. Alih-alih mengganti satu hegemon dengan hegemon lainnya terdapat peluang bagi Negara Selatan untuk mengimajinasikan kembali bentuk multilateralisme melalui Kerja Sama Selatan-Selatan. Namun hal ini harus dimulai dengan meretas model pembangunan dan ekonomi kapitalis yang melemahkan kedaulatan rakyat dan disertai dengan pengadopsian pengetahuan dan praktik yang dilakukan masyarakat Negara Selatan.

Tulisan ini merupakan ringkasan dari paparan narasumber : Lutfiyah Hanim (Third World Network) dan Olisias Gultom (Hints) dari diskusi Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Keadilan Ekonomi (Koalisi MKE) pada 6 Mei 2024 dan dilengkapi dengan beberapa referensi yang terkait.